
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BAUBAU)

Suhardin*¹, Lia Hanifa²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,
Indonesia

e-mail: suhardinsuhardin17075@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Baubau). Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear sederhana. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau, yang dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dengan koefisien regresi yang bertanda positif yaitu 0,933. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki dampak sebesar 0,452 atau 45,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD di Kota Baubau.

**Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah**

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of implementing public sector accounting on the accountability of the performance of local government agencies (Case Study of the Baubau City Government). In this research, the methods used are quantitative descriptive analysis methods and simple linear regression analysis. The data collection method was carried out using a questionnaire and processed using the SPSS application. Based on the research results, it was concluded that the application of public sector accounting has a significant influence on the accountability of government agency performance in the Baubau City OPD, which can be seen from the results of tests carried out in this research and obtained a significant value of $0.000 < 0.05$, with a regression coefficient which has a positive sign is 0.933. The variable implementation of public sector accounting has an impact of 0.452 or 45.2% on the accountability of government agency performance in OPD in Baubau City.

**Keywords: Public Sector Accounting, Performance Accountability Of Local Government
Agencies**

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia, karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu masyarakat praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi di berbagai instansi pemerintah (Gea, 2012).

Menurut Rohim (2022), kecurangan (*fraud*) adalah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Fedrianawati, 2017).

Penelitian-penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) berhasil mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil yang sejalan juga dikemukakan oleh Rohim, dkk (2022) yang mendapatkan hasil bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akan tetapi penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2022) yang mengungkapkan bahwa sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian Rezeki (2022) juga membantah adanya pengaruh yang dihasilkan oleh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penelitian yang membuktikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Baubau). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Baubau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Yuesti (2020), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Bastian (2014) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Akuntansi sektor publik juga diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Artinya bahwa yang dimaksud dengan dana masyarakat merupakan dana yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan dikelola oleh individu tetapi dana yang dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan usaha terutama yang bersifat keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas organisasi.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain pengelolaan keuangan negara, pelaporan keuangan, pemeriksaan, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Biduri, 2018).

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi karakteristik seperti berikut ini (Mardiasmo, 2018):

- 1) Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan public.
- 2) Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara.
- 3) Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik negara.

Standar Akuntansi Sektor Publik

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan standar akuntansi antara lain (Halim dan Kusufi, 2018):

1. Standar pemberi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
2. Standar pemberi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
3. Standar pemberi petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Jenis-Jenis Akuntansi Sektor Publik

Jenis akuntansi sektor publik dibagi menjadi 6 bagian yaitu akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi partai politik dan LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan dan kesehatan, dan akuntansi tempat peribadatan. Berikut adalah penjelasan dari enam jenis akuntansi sektor publik tersebut (Mardiasmo, 2018):

1. Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari akuntansi keuangan daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya.

3. Akuntansi Partai Politik dan LSM

Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

4. Akuntansi Yayasan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan.

5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan

Akuntansi ini juga meliputi pengolahan data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga-lembaga pendidikan. Fungsinya adalah untuk pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan agar kegiatan operasional dan aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Akuntansi kesehatan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipindahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana.

6. Akuntansi Tempat Peribadatan

Akuntansi tempat peribadatan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya tempat peribadatan. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa apabila dilihat dari garis besarnya, maka organisasi akuntansi sektor publik itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Instansi pemerintah, adalah suatu lembaga sektor publik yang bentuknya pemerintahan dalam suatu negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Organisasi nirlaba milik pemerintah, yang meliputi organisasi nirlaba milik pemerintah seperti perguruan tinggi dan rumah sakit negeri dan yayasan milik pemerintah misalnya badan layanan umum, badan layanan umum daerah.
3. Organisasi nirlaba yang dimiliki oleh swasta yaitu misalnya sekolah swasta dan rumah sakit swasta.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

American Accounting Association dalam Rahmawati (2022) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya

yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tadjudinsyah, dkk (2023) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan data.
- 4) Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.
- 5) Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- 6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figure*). Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Indikator Akuntansi Sektor Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntansi sektor publik adalah (Hikmawati, 2022):

- 1) Transaksi
Transaksi adalah setujunya jual beli diantara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang dimaksudkan transaksi dalam hal ini merupakan transaksi diantara organisasi sektor publik dan pihak lainnya.
- 2) Analisis Bukti Transaksi
Analisis bukti transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap adanya transaksi itu disertai dengan bukti pendukung yang berisikan informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dan bukti itulah yang akan dianalisis dan digunakan untuk dasar pencatatan.
- 3) Pencatatan Data Transaksi
Pencatatan data transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atau bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
- 4) Pengikhtisaran
Pengikhtisaran yang dimaksud adalah di dalam buku besar terdapat daftar nama

kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang tersedia, catatan atas transaksi tersebut selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal itu yang dimaksud dengan posting.

5) Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam hal ini adalah selama satu periode akuntansi, transaksi tersebut yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar. Kemudian berdasarkan catatan tersebut dibuatlah suatu laporan keuangan yang nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut selanjutnya dianalisis untuk melihat atau menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

Akuntabilitas Kinerja

Mahmudin dalam Aulia (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas kinerja itu sendiri menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Ziman dan Muhammad dalam Peilouw (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu entitas atau organisasi, apakah hasil kinerja yang telah dilakukan entitas atau organisasi tersebut berhasil sesuai dengan target atau mengalami kegagalan.

Macam-Macam Akuntabilitas Kinerja

Adapun penjelasan mengenai macam-macam akuntabilitas menurut Yuesti (2020) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), adalah akuntabilitas atas dikelolanya dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit operasional pada pemerintah daerah, akuntabilitas pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah pusat pada majelis permusyawaratan rakyat.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), adalah akuntabilitas atas dikelolanya dana kepada otoritas pada tinggi, seperti pertanggung jawaban kepada publik.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan LAKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Herlina, 2019):

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan dan akurat.

- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Akuntabilitas Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban untuk memberi tanggungjawab keberhasilan ataupun kegagalan disaat melaksanakan misi organisasi, termasuk perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja itulah beberapa komponen yang terintegasi menjadi satu. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri dari (Mardiasmo, 2018):

- 1) Perencanaan strategi,.
- 2) Perencanaan kinerja,
- 3) Pengukuran kinerja,
- 4) Pelaporan kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Baubau, yaitu seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kota Baubau. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Se-kota Baubau yang berjumlah 32 OPD (<https://web.baubaukota.go.id/opd>). Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel yang menjadi Kriteria dipilih pada penelitian ini yaitu pegawai yang berhubungan dengan variabel penelitian terdiri dari Kepala OPD/Dinas, Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Bendahara, yang didasari bahwa responden inilah yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, tiap OPD memiliki 4 responden sehingga sampel dalam penelitian iniberjumlah 128 responden.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau dianalisis dengan angka sehingga menghasilkan informasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu seperti data hasil tabulasi kuesioner.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung pada objek penelitian yaitu yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada direktur utama, manajer dan karyawan yang berhubungan langsung dengan pembuatan data pembiayaan dan pendapatan (laporan laba/rugi). Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti buku-buku, jurnal penelitian dan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Dalam mengumpulkan data, Penelitian ini menggunakan skala pengukuran *likert*. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Pengukuran skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata (Sugiyono, 2017).

Adapun skor untuk skala pengukuran *likert* yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Skor Pengukuran Skala Likert

| Skor | Simbol | Kriteria Jawaban |
|------|--------|---------------------|
| 5 | SS | Sangat Setuju |
| 4 | S | Setuju |
| 3 | KS | Kurang Setuju |
| 2 | TS | Tidak Setuju |
| 1 | STS | Sangat Tidak Setuju |

Sumber: Sugiyono (2017)

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, sehingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan aplikasi bantuan untuk melakukan pengolahan data yaitu aplikasi SPSS. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis dan menguji hipotesis yaitu statistika deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Sedangkan analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal satu variabel independen dan satu variabel dependen, Sugiyono (2016). Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan linear regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel

X = Penerapan Akuntansi Sektor Publike

e = Tingkat kesalahan konstanta

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Baubau adalah sebuah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Baubau memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2001. Luas Kota Baubau adalah 295,072 km². Kota Baubau dijuluki sebagai kota seribu benteng. Pada awalnya, Baubau merupakan pusat kerajaan buton (wolio), yang berdiri pada abad ke-15 yaitu tahun 1401-1499. Buton mulai dikenal dalam sejarah Indonesia karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagama karya Prapanca pada tahun 1365 masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman. Kota Baubau memiliki 32 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang terdiri atas 23 dinas, 6 badan, 2 sekretariat dan 1 inspektorat.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Adapun persamaan linear regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis regresi linear sederhana adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data maka diperoleh tabel berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | | | |
| 1 | (Constant) | 16.497 | 2.732 | | 6.038 | .000 |
| | X_Penerapan_ASP | .933 | .094 | .676 | 9.964 | .000 |

a. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas_KIPD

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 16,497 + 0,933X$$

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (uji-t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Parsial Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | | | |
| 1 | (Constant) | 16.497 | 2.732 | | 6.038 | .000 |
| | X_Penerapan_ASP | .933 | .094 | .676 | 9.964 | .000 |

a. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas_KIPD

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas yang merupakan tabel hasil uji parsial, maka dapat dilihat bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik (X) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

| | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .676 ^a | .457 | 2.709 |

a. Predictors: (Constant), X_Penerapan_ASP

b. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas_KIPD

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,452 atau 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar 45,2%, sedangkan sisanya 54,8% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau. Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggung jawaban publik (Aulia, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan objek pengeluaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila dengan telah diterapkan akuntansi sektor publik di dalam instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau maka kinerja instansi tersebut mengalami perbaikan ke yang lebih baik.

Hasil penelitian ini mendukung atau sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021:62), Gea (2021:92), Bakkareng (2022), Rahmawati dan Heliana (2022:57), dan Peilouw, dkk (2023:120), dimana dengan hasil-hasil penelitian tersebut secara empiris membuktikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan memperoleh nilai signifikan sebesar

0,000 < 0,05, dengan koefisien regresi yang bertanda positif yaitu 0,933, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki dampak sebesar 0,452 atau 45,2% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD di Kota Baubau.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Baubau, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi OPD Kota Baubau disarankan sebaiknya penerapan akuntansi sektor publik lebih ditingkatkan lagi mengingat bahwa peningkatan tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan menguji variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini sehingga dapat menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Rekayasa Sains: Bandung. Dalam teks yang dikutip: (Anggadini, Sri Dewi & Adeh Ratna Komala, 2017)
- Aulia, Oktaviani. 2021. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau. Dalam teks yang dikutip: (Aulia, Oktaviani, 2021)
- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. In: *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka: Jakarta Dalam teks yang dikutip: (Bastian, Indra, 2014)
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam teks yang dikutip: (Biduri, Sarwenda, 2018)
- Fedrianawati, Erlina Intan. 2017. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam teks yang dikutip: (Fedrianawati, Erlina Intan, 2017)
- Gea, Ilmi Rafarni. 2021. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang*. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.1, Hal.84-93. Universitas Negeri Medan. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/140> Dalam teks yang dikutip: (Gea, Ilmi Rafarni, 2021)
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat: Jakarta. Dalam teks yang dikutip: (Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi, 2018)
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit BPFE: Yogyakarta. Dalam teks yang dikutip: (Hartono, Jogiyanto, 2017)

- Herlina. 2019. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam teks yang dikutip: (Herlina, 2019)
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta. Dalam teks yang dikutip: (Mardiasmo, 2018)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung. Dalam teks yang dikutip: (Sugiyono, 2016)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung. Dalam teks yang dikutip: (Sugiono, 2017)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung. Dalam teks yang dikutip: (Sugiono, 2018)
- Susetyo, Budi. 2017. *Statistika untuk Analisis Data Penelitian: Dilengkapi Cara Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel*. Refika Aditama: Bandung. Dalam teks yang dikutip: (Susetyo, Budi, 2017)
- Yuesti, Anik. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Noah Alethia: Bali. Dalam teks yang dikutip: (Yuesti, Anik, 2020)